

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan perekonomian ke depan akan semakin kompetitif, salah satunya ditandai dengan diberlakukannya kawasan terintegrasi yang disebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN. MEA menempuh babak baru dengan pemberlakuan liberalisasi ekonomi pada 31 Desember 2015. Rahayu : 416, mengemukakan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang dapat membuka peluang juga tantangan bagi masyarakat Indonesia. Globalisasi memberikan kesempatan untuk negara berkembang agar mendapatkan akses pasar, teknologi, informasi dari negara yang lebih maju. Di awal pembentukan *ASEAN Declaration*, di Bangkok 8 Agustus 1967 ditujukan untuk kerjasama yang berorientasi politik untuk mencapai kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Sesuai dengan pilar MEA, akan terciptanya pasar tunggal di wilayah ASEAN. Hal tersebut memunculkan aliran perdagangan barang, jasa, modal dan investasi secara bebas. Jumlah penduduk yang besar membuat Indonesia akan sangat berpotensi untuk menjadi pasar yang kuat dalam perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN. Terbukanya akses perdagangan bebas memberikan peluang bagi UMKM untuk semakin memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke pasar Internasional. Akan tetapi di sisi lain berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN cukup berat karena

persaingan yang semakin ketat, selain itu penguasaan teknologi yang belum setara. Sehingga diharapkan setiap negara yang menjadi anggota dari MEA ini dapat meningkatkan persaingan ekonominya termasuk Indonesia. Karena salah satu bagian terbesar pelaku ekonomi di Indonesia adalah UMKM.

Kondisi ini memunculkan berbagai peluang dan tantangan baru. Salah satu peluangnya adalah kita dapat dengan mudah memperluas akses pasar dari hasil komoditas lokal, akan tetapi pada sisi lain tingkat persaingan antar produk juga akan semakin kompetitif karena hasil produk negara ASEAN lainnya dapat secara mudah masuk ke Indonesia. Situasi yang pesimis turut terlihat di Indonesia. Beragam kekayaan bahkan menyebut pemerintah Indonesia lambat dalam merespon segala hal yang berkaitan dengan MEA. Bahkan, dengan tenggat waktu yang semakin terbatas, Indonesia justru semakin terlihat tidak mempersiapkan strategi khusus dalam menghadapi MEA (Tirtayasa, 2016 : VII). Belum serius dan optimalnya persiapan yang dilakukan, maka diprediksi Indonesia hanya akan dijadikan ladang subur pasar produk-produk asing, baik yang berasal dari kawasan di luar ASEAN ataupun dari ASEAN itu sendiri.

Untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan MEA, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang peningkatan daya saing dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang lebih berfokus pada pengembangan strategi. Provinsi Jawa Barat memiliki banyak potensi yang menjadi nilai jual dalam menghadapi MEA. Jawa Barat merupakan sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia serta memiliki

potensi sumber daya alam, khususnya pariwisata dan budaya. Berdasarkan data statistik yang dirilis dalam situs resmi Pemprov Jabar, secara keseluruhan Jawa Barat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yakni sebesar 14,33%. Memasuki MEA, pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan beberapa strategi yang difokuskan pada peningkatan daya saing dengan program “Jabar Masagi”, yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha. Sehingga penyelarasan kebijakan dilakukan dengan membentuk suatu garis koordinasi dan kerjasama yang efektif sehingga dapat mendongkrak nilai jual Provinsi Jawa Barat untuk menjadi pelaku utama dan memberikan kontribusi untuk 12 sektor prioritas MEA.

Kabupaten Garut sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat harus mampu untuk bersaing dalam MEA. Untuk mewujudkan salah satu visi pembangunannya yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pemerintah Kabupaten Garut perlu memiliki strategi reformasi birokrasi dan penguatan ekonomi lokal yang mampu menangkap peluang sekaligus menangani berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Perlu diketahui bahwa selama ini reformasi birokrasi cenderung hanya dipahami dalam tataran teknis. Kita patut mempersoalkan bagaimana arah dan cara kerja reformasi birokrasi yang berjalan selama ini terkait dengan tantangan eksternal yang muncul. Artinya, dalam menghadapi MEA perlu adanya pembenahan paradigma aparatur agar mampu bersiap menghadapi dan merespon ekonomi kawasan. Pembenahan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan memperkenalkan cara pandang. Selanjutnya untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi

ekonomi lokal yang dapat ditempuh melalui strategi dari pemerintah Kabupaten Garut.

Potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Garut cukup beragam, salah satu potensinya yaitu produk komoditas lokal yang dihasilkan oleh pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ada 7 potensi produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut, yaitu:

1. Minyak akar wangi, salah satu produk komoditas yang dikembangkan masyarakat Garut dengan kapasitas produksi setiap tahunnya diproduksi sebanyak 72 ton minyak akar wangi untuk memenuhi pasar domestik maupun luar negeri.
2. Dodol Garut, produk yang telah menjadi incaran wisatawan lokal maupun mancanegara.
3. Jaket kulit Garut, tidak hanya menjadi perhatian konsumen lokal, akan tetapi berhasil menguasai pasar mancanegara seperti Singapura, Malaysia, dan Australia.
4. Batik Tulis Garutan, minat batik tulis mengalami penurunan akan tetapi minat konsumen masih cukup tinggi. Rata-rata kapasitas produksi hingga 1.600 per tahunnya.
5. Kopi sunda Hejo, yang berada di Kadungora dan sudah rutin diekspor.
6. Jeruk Garut, salah satu produk komoditas pertanian.
7. Domba Garut, merupakan penghasil daging yang berkualitas.

Hal inilah yang menjadi perhatian untuk memperkuat UMKM, karena merupakan sektor usaha yang memiliki peranan penting dalam menghadapi

MEA. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM salah satunya yaitu target penjualan yang tidak tercapai, kesulitan dalam membuat peluang baru, permasalahan kurang mampunya usaha mikro dalam modal, dan sumber daya manusia, menjadi permasalahan dari UMKM sendiri. Padahal produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Garut menjadi potensi untuk dapat bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

UMKM telah melaksanakan pelatihan kemasan, legalitas usaha untuk memajukan UMKM ke pamasaran agar omsetnya naik. Akan tetapi ada beberapa tahapan yang membuat usaha mikro mengalami kesulitan dalam ekspor, misalnya pembuatan SKA. Dan Garut tidak dapat mengeluarkan SKA. Kemudian Kabup aten Garut belum mempersiapkan legalitas untuk ekspor, tetapi Garut mempunyai perwakilan dalam ekspor yaitu kopi sunda hejo yang telah rutin setiap tahunnya. Usaha mikro masih berat dalam hal ekspor. UMKM Garutpun sudah bekerjasama dengan *Free Trade Agreement* (Erni, wawancara, senin 25 Januari 2020).

Kondisi ini menjadikan Kabupaten Garut sebagai *consumer base* yang dapat menimbulkan efek positif dan negatif. Sehingga langkah strategi secara umum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Garut terhadap penguatan UMKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN :

1. Pemerintah Kabupaten Garut melalui SKPD/Unit Kerja terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi terutama untuk melakukan peningkatan daya saing daerah serta melakukan

persiapan pelaksanaan MEA, dengan berpedoman pada strategi yang telah digariskan Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang peningkatan daya saing Nasional dalam rangka menghadapi MEA.

2. Sebagai contoh dari salah satu strategi menghadapi MEA tersebut adalah terkait produk lokal Kabupaten Garut, maka dilakukan melalui pengembangan daya saing dalam rangka peningkatan eligibilitas (pemuahan syarat tertentu) dan kapabilitas daya saing UMKM. Seperti dari sisi pembiayaan antara lain melalui dana bergulir UMKM yang memberikan fasilitas modal kerja dengan tingkat bunga cukup murah, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait produksi, kemasan dan kewirausahaan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta bimbingan teknis dan fasilitas kepada UMKM di wilayah Kabupaten Garut untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HAKI) seperti merk dan lain-lain (Data Bappeda Kabupaten Garut).

Pemerintah sudah selayaknya untuk berperan membangun optimalisasi kerjasama saling menguntungkan dengan negara ASEAN dan peran pengusaha untuk mempersiapkan dan memasarkan produk lokal ini. Penjualan secara tradisional dapat dilakukan melalui penjualan langsung atau pemasokan secara langsung ke pasar-pasar induk. Akan tetapi menjadi tantangan harga jual dan penyerapan pasar. Petani dapat melakukan pengecekan harga, namun keputusan harga bukan berada di tangan petani. Persaingan dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang di dukung dengan

teknologi membuat Indonesia khususnya daerah harus mengkaji marketing traditional dan digital. Marketing traditional yaitu marketing yang memanfaatkan cara-cara promosi fisik seperti brosur, iklan di koran. Traditional marketing telah mengalami transformasi ke era digital toko online selama 24 jam. Cara ini lebih terjangkau dan dapat dilakukan di mana saja, dan kapan saja. Pertanyaannya bagaimana strategi dari pemerintah daerah garut sendiri dalam memberikan penyuluhan kepada petani agar mereka dapat melakukan inovasi terhadap produknya.

Michael E Porter (Barney & Wright, 1998; Dessler, 2000), menekankan bahwa upaya mempertahankan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) dengan mengandalkan faktor murah tenaga kerja atau skala ekonomi sekalipun sudah usang. Saat ini dan di masa yang akan datang, untuk unggul di kancah globalisasi hanya dapat ditempuh melalui proses inovasi dan pengembangan tiada henti. Strategi tersebut harus di persiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut yang juga berperan untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu menghadapi MEA.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini karena dampak dari masyarakat ekonomi ASEAN sendiri bukan hanya pada skala nasional melainkan juga pada skala lokal. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Garut karena Garut merupakan daerah yang memiliki banyak potensi, terutama potensi komoditas lokal yang dapat berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Pemerintah Daerah berperan untuk memberikan strategi bagaimana Garut dapat memperkuat UMKM yang di miliki baik dari segi sumber daya

alam maupun sumber daya manusia agar masyarakat siap berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

Hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti, melihat latar belakang kondisi Kabupaten Garut yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai potensi produk unggulan yang mempunyai peran penting terhadap pengembangan ekonomi. Dayat : 33, Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami peningkatan yang signifikan namun pada kenyataannya juga memberi dampak pada ketidakmerataan. Kemampuan ekonomi lokal diharapkan dapat membuat daya saing ekonomi nasional, yang mana sesuai kesepakatan pada tahun 2015 dalam menghadapi tantangan pasar ekonomi ASEAN. Akan banyak tantangan selain dari kreativitas produk yang harus terus berinovasi, kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai sektor perekonomian menjadikan MEA salah satu wujud untuk melatih daerah Garut untuk lebih mandiri, dan adaptif agar mampu menjadi daerah yang tidak takut menghadapi globalisasi terutama untuk bersaing dalam perekonomian. Inisiatif pemerintah pusat untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan seputar MEA masih sangat terbatas. Dalam birokrasi daerah yang sangat kental dengan intruksional, maka lemahnya sosialisasi oleh pemerintah pusat sekaligus mengandung makna bahwa MEA adalah “urusan pusat” dan pemerintah daerah diberi pilihan untuk tidak terlalu memperhatikannya. Hal itu perlu segera dibenahi karena masyarakat ekonomi ASEAN adalah agenda regional yang

telah menjadi komitmen nasional dan agenda MEA tidak akan berjalan baik jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah penulis yaitu, Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam Penguatan UMKM untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana strategi Pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penguatan UMKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis melakukan pembatasan masalah agar lebih terfokus dan terarah pada saat melakukan penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai topik bagaimana strategi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penguatan UMKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Ilmu

Sebagai sumbangan pengetahuan yang berhubungan dengan ekonomi politik khususnya mengenai strategi pemerintah daerah Kabupaten

Garut dalam memperkuat UMKM untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dan memberikan kontribusi pemikiran yang berhubungan dengan masyarakat ekonomi ASEAN.

2. Manfaat Praktis

Untuk akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dalam bidang akademik untuk mengembangkan pembelajaran khususnya di dalam mata kuliah ekonomi politik. Dan dalam bidang pemerintahan diharapkan penelitian ini memberikan alternatif strategi yang dapat dipakai oleh pemerintah daerah dalam menghadapi pasar bebas di ASEAN.